



Pembelajaran untuk Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Rachma Nurbani

Peneliti Senior, The SMERU Research Institute

**LOKAKARYA PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN**
Balai Tawang Arum - Surakarta, 29 Maret 2016





Tantangan Kemiskinan Perkotaan

Di Dunia:

- Persentase penduduk perkotaan: 30% (1950), 54% (2014)
- Urbanisasi tercepat terjadi di negara-negara berpendapatan menengah-bawah (*lower-middle income countries*) di Asia dan Afrika.
- Separuh penduduk perkotaan dunia tinggal di 7 negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia:

- Penduduk yang tinggal di perkotaan: 53% (2015), 67% (prediksi untuk 2035)
- Jumlah penduduk miskin perkotaan: 9,5 juta jiwa (1980), 10,5 juta jiwa (2014)
- Prediksi untuk 2020: kemiskinan perkotaan > kemiskinan perdesaan

Sumber: United Nations (2014), PSF (2013), BPS (2014).

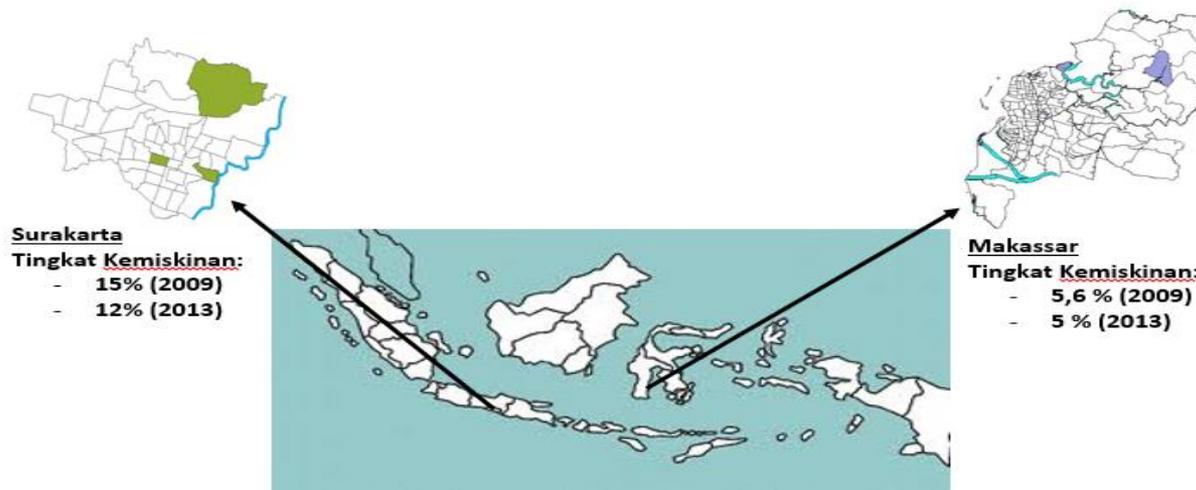
- **Urbanisasi -> konsekuensi terhadap kemiskinan perkotaan**
- Diperlukan upaya lebih besar untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan
- **Integrasi antara aspek spasial dengan aspek sosial-ekonomi**





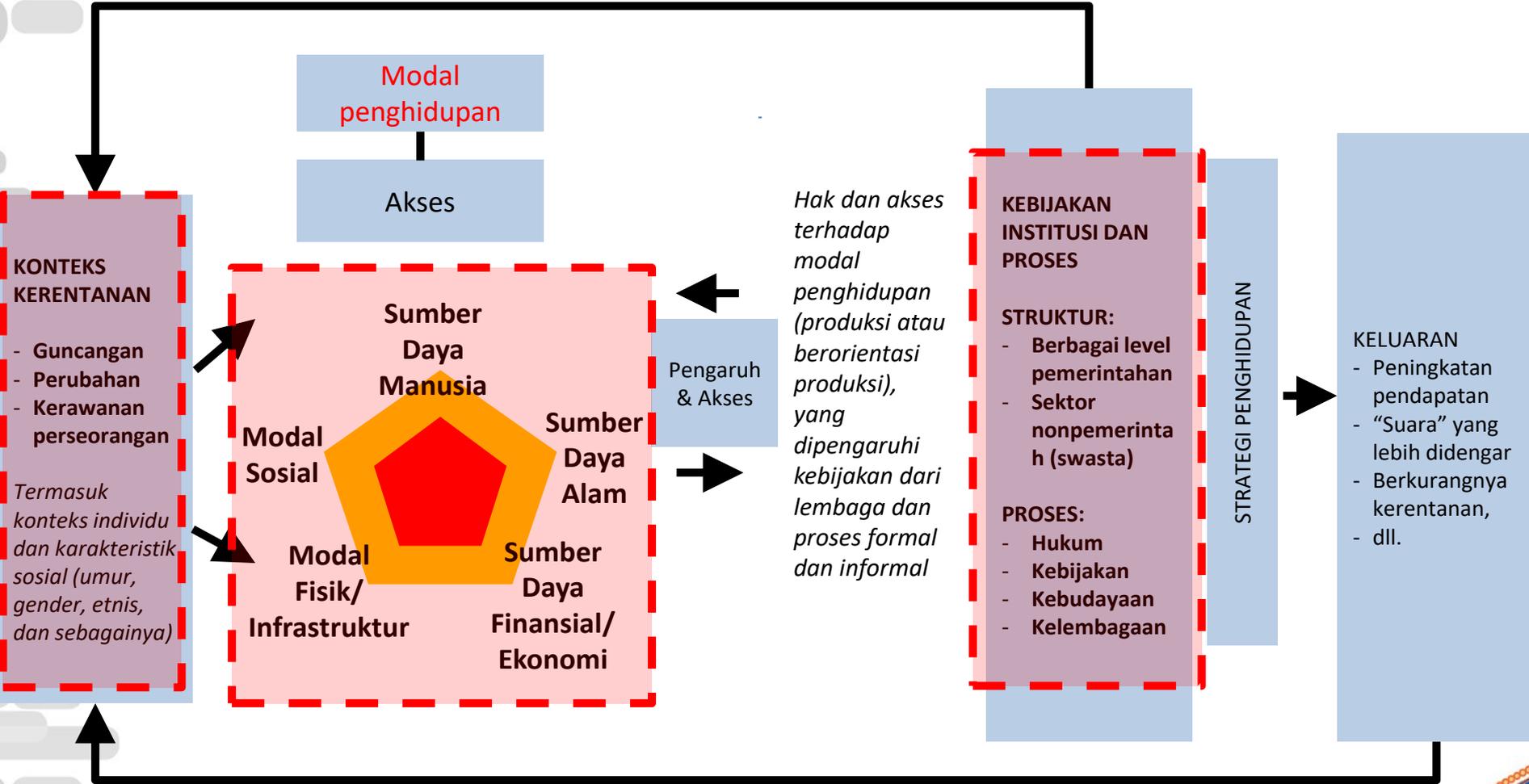
Studi Kemiskinan Perkotaan: Metodologi

- **Pertanyaan Penelitian:**
 - Bagaimana perencanaan spasial perkotaan (termasuk perencanaan pembangunan secara umum dan tata ruang) mengakomodasi upaya penanggulangan kemiskinan?
 - Sejauh mana perencanaan perkotaan **menemukenali** berbagai persoalan kemiskinan?
- **Lokasi** → di 2 kota: Surakarta dan Makassar; masing-masing 3 kelurahan
- **Tahapan:**
 - Pemetaan pemangku kepentingan utama (Januari–Februari 2011)
 - Kajian kemiskinan partisipatoris di tingkat komunitas (Maret–April 2011)
 - Lokakarya partisipatoris dan diseminasi hasil penelitian (November 2011)





Kerangka Penelitian: Kerangka Penghidupan Berkelanjutan dari DFID



Diadaptasi dari Carney, et al. (1999)





Profil Kemiskinan: Modal Penghidupan Masyarakat Miskin

Modal Manusia

- Peningkatan capaian pendidikan masyarakat miskin, meskipun masih lebih rendah daripada masyarakat umum
- Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan: jaminan kesehatan nasional dan daerah

Modal Alam

- Akses rendah, terutama di daerah pinggir laut dan sungai
- Di daerah dalam kota: ruang yang terbatas;
- Akses agak lebih baik di daerah pinggiran kota daripada di dalam kota
- Penurunan kualitas lingkungan

Modal Keuangan

- Akses rendah di semua daerah, karena status pekerjaan informal dan serabutan
- Tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal

Modal Fisik

- **Perbaikan kondisi jalan dan sanitasi, kecuali di daerah pinggir laut dan sungai**
- Akses terhadap listrik dan air bersih terbatas, khususnya di daerah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi

Modal Sosial

- Secara konsisten tinggi di semua daerah: jaring pengaman sosial di antara anggota masyarakat



Sumber Kerentanan Masyarakat Miskin

- Spasial dan nonspasial

Perubahan (trend)

Peningkatan pertumbuhan penduduk, dan migrasi dari daerah sekitar
Penurunan kualitas lingkungan alam: pinggir laut dan sungai
Peningkatan harga barang/jasa kebutuhan hidup

Faktor Musiman

Alam: musim hujan, perubahan cuaca yang makin tak terduga
Sosial budaya: hari raya, musim menikah, tahun ajaran baru (sekolah)

Guncangan (shock)

Krisis keuangan global 2008/09
Banjir, kebakaran, pengusuran
Skala individu/RT: sakit

DAMPAK

Berkurangnya kesempatan untuk mengakumulasi asset/modal dan menabung

DAMPAK

Meningkatnya persaingan dalam mencari pekerjaan
Makin terancamnya modal penghidupan
Menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan

DAMPAK

Mengancam, bahkan menghancurkan modal penghidupan yang ada

Dampak lanjutan:

- Kerentanan finansial → berutang, dan kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi untuk anak-anak
- Kerentanan pada aspek fisik (terutama kondisi tempat tinggal) → ancaman terhadap kesehatan
- Akumulasi semua bentuk kerentanan → kondisi psikologis (mudah depresi)





Kerentanan Spasial: Faktor-faktor yang Memengaruhi

Daerah pinggir laut/sungai



- Penurunan kualitas SDA
- Lahan ilegal
- Kurangnya sarana sanitasi dan air bersih

Daerah tengah kota



- Risiko kebakaran
- Kurangnya ruang publik
- Status tempat tinggal (Magersari di Solo)

Daerah pinggir kota



- Status tempat tinggal
- Ketiadaan sistem pembuangan sampah dan sistem sanitasi yang baik
- Kurang terjangkau layanan dasar perkotaan (listrik dan air bersih)



Sumber Dukungan dan Aktor Kunci

Tingkat Lokal/Masyarakat

Aparat di tingkat lokal (RT, RW, kelurahan)

Layanan dasar dan kader (posyandu, PKK)

Sumber dukungan keuangan informal (*bank titil*, koperasi keliling, rentenir, warung)

Formal (pegadaian)

Pemerintah Kota

Kantor Walikota

Bappeda

Dinas-dinas teknis

TKPKD

Pemerintah Pusat

Program Pemerintah Pusat: PNPM

Organisasi nonpemerintah: JICA
Solo Kota Kita
Kupas

- Bappeda memegang peran kunci dalam perencanaan
- TKPKD: potensi peran penting (salah satunya sebagai **forum bertemunya aktor pemerintah dan nonpemerintah**), tetapi masih kurang optimal
- Kalangan nonpemerintah: fokus pada intervensi langsung, cakupan terbatas
- Terlepas dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang ada, masyarakat lebih banyak mengakses sumber dukungan informal





Keterkaitan Perencanaan Tata Ruang dan Penanggulangan Kemiskinan: Isu Kunci

1. Kaitan antara perencanaan spasial (tata ruang) dan penanggulangan kemiskinan masih terbatas dan lemah
 - **Belum terintegrasi di dalam dokumen-dokumen perencanaan penting** (RTRW; RPJMD; dan Dokumen Perencanaan SKPD)
 - Belum ada data spasial lokasi kemiskinan yang resmi dan terintegrasi
2. Egosektoral SKPD dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan
 - Pengetahuan yang terbatas mengenai isu-isu kemiskinan (terutama SKPD di luar Bappeda, Dinsos, dan BPM)
 - Lebih memprioritaskan isu sektoral
 - Kurang koordinasi (peran koordinasi TKPKD masih terbatas dan masih menghadapi kendala)
3. Inisiatif penanggulangan kemiskinan masih sangat programatis
 - Program bersifat sektoral
 - Advokasi oleh organisasi nonpemerintah: terfokus pada anggaran, belum banyak menyentuh aspek spasial (**kecuali Mini Atlas Solo Kota Kita**)
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan sangat minim
 - Sikap skeptif masyarakat, dominasi elite
 - Potensi forum musrenbang

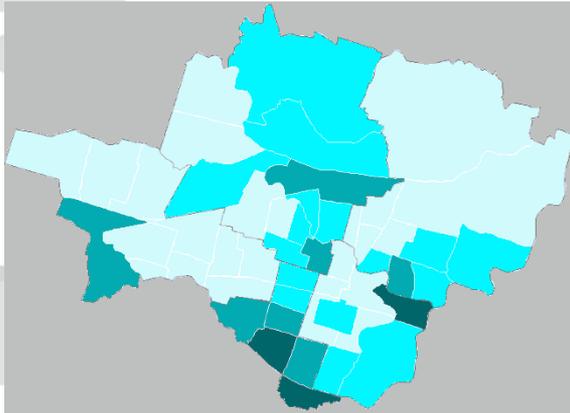


Tantangan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surakarta



Peta Kemiskinan Surakarta per Kelurahan

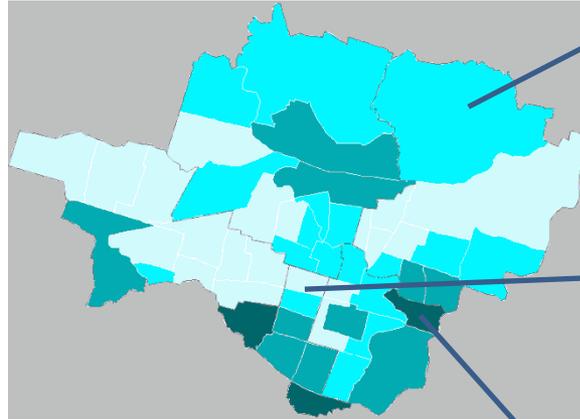
GKN 2010



Tingkat Kemiskinan (GKN)-2010



GKN \$2 (2010)



Tingkat Kemiskinan (2PPP)-2010



Hasil Asesmen Kemiskinan Partisipatoris 2011

Mojosongo

Lokasi : pinggir kota (*peri-urban*)
Penghidupan masyarakat: pekerja sektor informal, pemulung
Ruta miskin (2011): 20%

Kemlayan

Lokasi: tengah kota
Penghidupan masyarakat.: pekerja sektor informal, pedagang kaki lima, tukang parkir
Ruta miskin (2011): 41%

Sangkrah

Lokasi: pinggir Sungai Bengawan Solo
Penghidupan masyarakat.: pekerja sektor informal, pemulung
Ruta miskin (2011): 51%

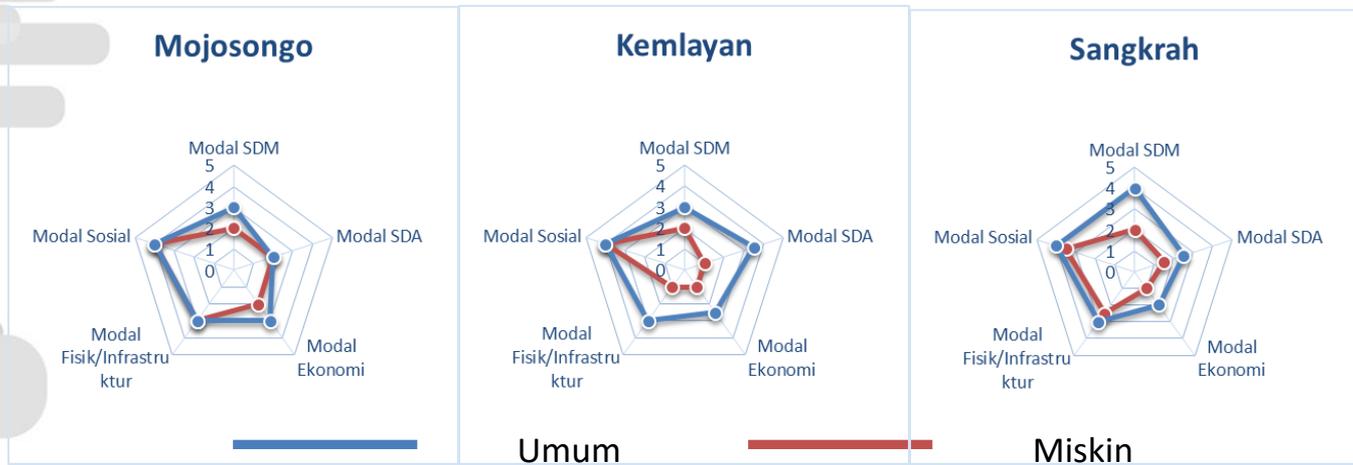
Sumber: www.indonesiapovertymap.org

- Lapangan pekerjaan utama penduduk miskin: perdagangan (30%), industri pengolahan (22%), jasa kemasyarakatan (16%)
- Perdagangan dan industri pengolahan: Surakarta > rata-rata kota nasional
- Industri pengolahan: Surakarta > Jawa Tengah
- Lapangan pekerjaan utama penduduk miskin Jawa Tengah: pertanian (Susenas, 2014)

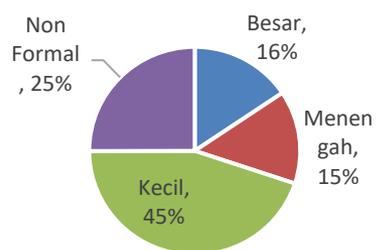




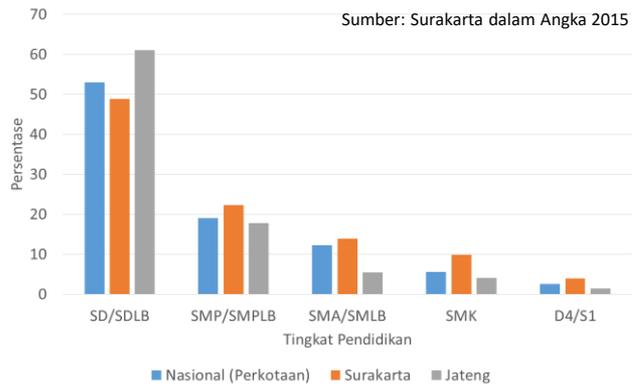
Modal Penghidupan Masyarakat



Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Industri, 2014



- Kondisi dan akses terhadap modal penghidupan: masyarakat miskin < umum
- Modal sosial secara konsisten tinggi: antarkelompok kesejahteraan dan antarwilayah
- Jaminan kesehatan dan pendidikan daerah: PKMS dan BPMKS → SDM miskin < umum
- Pendidikan yang cukup tinggi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan
- Penyerapan tenaga kerja: industri kecil dan nonformal > menengah dan besar



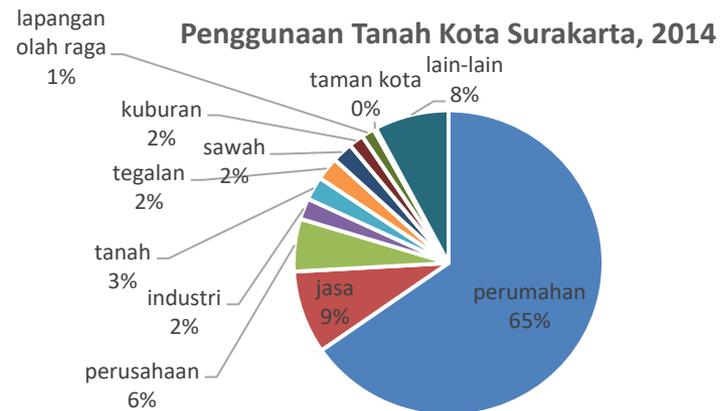
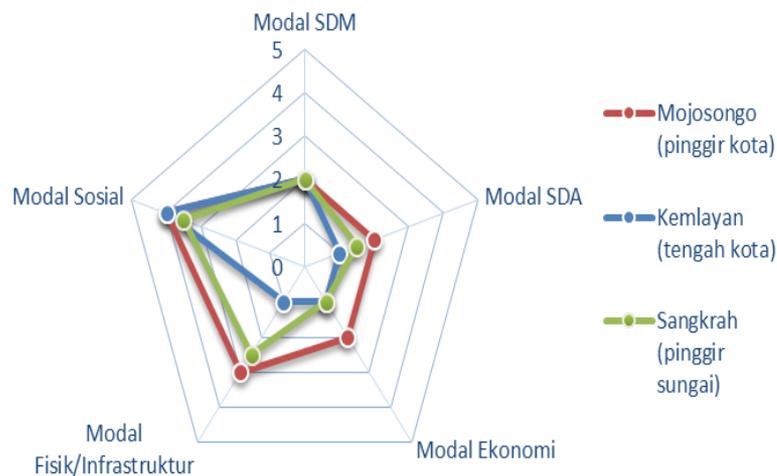
Sumber: Susenas 2014





Tantangan Spasial Penanggulangan Kemiskinan di Surakarta

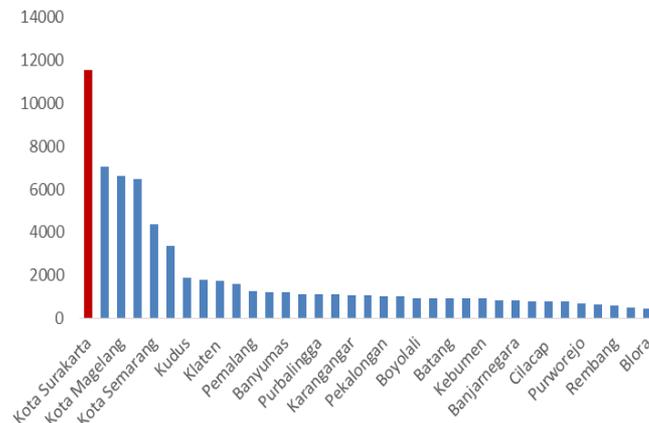
Modal Penghidupan Kelompok Miskin



Sumber: Surakarta dalam Angka 2015

- Isu spasial: Mojosongo (kawasan baru pembangunan, tujuan relokasi); Kemlayan (*magersari*, ruang terbatas); Sangkrah (kantong kemiskinan, banjir, relokasi)
- Aspek spasial kemiskinan (antarwilayah): tidak terlihat perbedaan berarti di antara modal SDM dan modal sosial, tetapi terdapat perbedaan dalam modal fisik, ekonomi, dan SDA
- Keterbatasan ruang → kepadatan tertinggi di Jawa Tengah; Kecamatan Serengan (Kemlayan) → terpadat di Surakarta

Kepadatan Penduduk Jawa Tengah per Km², 2013



Sumber: Jawa Tengah dalam Angka 2014





Implikasi Kebijakan

- Untuk meningkatkan efektivitas program dan mengurangi kerentanan masyarakat miskin, perencanaan program penanggulangan kemiskinan perkotaan harus didasarkan atas analisis kondisi spasial dan penghidupan
→ Rencana tata ruang yang lebih inklusif terhadap masyarakat miskin; perbaikan daerah kumuh
- Data kemiskinan perlu lebih komprehensif, mencakup aspek spasial
→ peta kemiskinan, peta kerentanan (cakupan Solo Raya)
- Skema perlindungan sosial harus lebih mampu **menemukenali** faktor kerentanan masyarakat miskin
- Koordinasi pembangunan dan upaya penanggulangan kemiskinan antardaerah (Solo Raya)
→ Surakarta sebagai pusat perdagangan dan jasa (fokus pembangunan untuk meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi utama agar bisa meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja miskin—perdagangan dan jasa)



Terima Kasih



Anggota Tim Studi Kemiskinan Perkotaan:

Rizki Fillaili (Koordinator)
R. Justin Sodo
Prio Sambodho
Rachma Nurbani
Herry Widjanarko
Kartawijaya
Abdul Ghofur
Rika Kumala Dewi
Mona Sintia
Ratri Indah Septiana

Anggota Tim Data Kemiskinan Surakarta:

Widjajanti Isdijoso (Koordinator)
Nurmala Selly Saputri
Cecilia Marlina

www.smeru.or.id



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



SMERU Research Institute



SMERU Research Institute

